

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kondisi pembangunan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi yang belum sepenuhnya normal setelah dari krisis yang melanda dunia, secara cepat tidak bisa memberi nilai tambah yang signifikan bagi pengurangan pengangguran, dan pengentaskan kemiskinan.

Masyarakat di pedesaan dan yang ada di kantong-kantong kemiskinan di perkotaan adalah warga negara yang lebih banyak dan secara terus menerus mengalami berbagai masalah tersebut. Mereka adalah kelompok masyarakat yang hampir total mengalami ketidakberdayaan (*lack of resources*) untuk mengembangkan diri dari komunitasnya, sehingga dalam waktu panjang, mereka akan tetap berada pada lingkaran kebodohan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan. Kondisi masyarakat demikian, cenderung akan menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat luas (Suryadi, 2009: 5).

Kondisi ini pula mempengaruhi kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek khususnya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kebijakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, selama ini, cenderung lebih mengarah kepada kebijakan “produktivitas” dengan memaksimalkan hasil eksploitasi sumber daya laut tanpa ada kebijakan memadai yang mengendalikannya. Akibat dari kebijakan tersebut telah mengakibatkan beberapa kecenderungan yang tidak menguntungkan dalam aspek kehidupan, seperti:

(1) Aspek Ekologi, overfishing penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan telah cenderung merusak ekologi laut dan pantai (trawl, bom, potas, pukot harimau,) akibatnya menyempitnya wilayah dan sumber daya tangkapan, sehingga sering menimbulkan konflik secara terbuka baik

bersifat vertikal dan horisontal (antara sesama nelayan, nelayan dengan masyarakat sekitar dan antara nelayan dengan pemerintah), (2) Aspek Sosial Ekonomi, akibat kesenjangan penggunaan teknologi antara pengusaha besar dan nelayan tradisional telah menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan bagi nelayan tradisional. Akibat dari kesenjangan tersebut menyebabkan sebagian besar nelayan tradisional mengubah profesinya menjadi buruh nelayan pada pengusaha perikanan besar, dan (3) Aspek Sosio Kultural, dengan adanya kesenjangan dan kemiskinan tersebut menyebabkan ketergantungan antara masyarakat nelayan kecil/ tradisional terhadap pemodal besar/modern, antara nelayan dan pedagang, antara periphery terdapat center, antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini menimbulkan penguatan terhadap adanya komunitas juragan dan buruh nelayan. (Syarief, 2001 :1) .

Berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat pesisir maka sangat diperlukan suatu strategi yang bisa diandalkan untuk mengendalikan sekaligus dapat menumbuhkan investasi sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dewasa ini investasi sumber daya manusia menempati prioritas tertinggi, pemerintah masih pula dihadapkan terhadap persoalan klasik tentang mutu dan relevansi pendidikan yang tampak masih penuh “misteri” jika dihadapkan pada kondisi nyata kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja.

Masalah lain yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan, *pertama*, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis,

memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat

Pembangunan pendidikan pasca krisis yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengimplementasikan kembali program-program pembentukan Sumber Daya Manusia yang bermutu, dan profesional sebagai pelaku pembangunan baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Ditjen PLS, 2004).

Pendidikan merupakan instrumen yang penting bagi setiap bangsa untuk meningkatkan daya saingnya dalam percaturan politik, ekonomi, hukum, budaya dan pertahanan pada tatanan kehidupan global. Sadar akan hal ini maka setiap bangsa selalu membangun dunia pendidikan tanpa henti-hentinya. Bahkan ada kecenderungan yang amat jelas bahwa ada beberapa negara semakin meningkatkan investasinya dalam dunia pendidikan. Semakin intensif melakukan investasi dalam dunia pendidikan, semakin meningkat pula daya saing untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang prima.

Bagi bangsa Indonesia upaya pengembangan sumber daya manusia dalam berbagai dimensi telah menjadi sebuah prioritas kecuali itu adanya komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan secara berkualitas baik dari segi proses dan hasil pendidikan terkait dengan kompetensi lulusannya pada berbagai jenjang dan satuan pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Ditinjau dari tataran implementasi ternyata bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar persekolahan yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal atau

pendidikan luar sekolah dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berorientasi ke masa depan dapat menjadi pilar penting bagi pembangunan. Pendidikan luar sekolah baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat pada gilirannya telah memberikan pengaruh yang sangat berarti bagi peningkatan sumber daya manusia.

Trisnamansyah S (Kamil, 2010 : 30) menyatakan bahwa ilmu pendidikan luar sekolah diartikan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari interaksi sosial-budaya antara warga belajar sebagai objek dengan sumber belajar dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dengan menekankan pada pembentukan kemandirian, dalam rangka belajar sepanjang hayat.

Sementara itu Phillips H. Combs (dalam Joesoef, 1986; 50) menyatakan bahwa "Pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan belajar". Definisi ini menjelaskan bahwa pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal yang memberikan layanan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan belajar.

Terdapat empat hal yang menjadi pilar pengembangan Pendidikan luar sekolah sebagaimana dikemukakan oleh Sihombing (2000 :13), yaitu (1) memperluas pelayanan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang tidak dibelajarkan pada jalur pendidikan sekolah, (2) meningkatkan relevansi, keterkaitan dan kesepadanan program-program pendidikan luar sekolah dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembangunan, kebutuhan

dunia kerja, pengembangan industri dan ekonomi masyarakat dan pengembangan sumber daya alam, (3) peningkatan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan luar sekolah, serta (4) meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

Empat pilar sebagaimana disebutkan di atas bila dicermati sebenarnya mengandung arti bahwa pendidikan luar sekolah turut mengemban upaya pemerintah dalam menuntaskan masalah pembangunan pendidikan dewasa ini berkenaan dengan mutu, pemerataan, relevansi, efektifitas dan efisiensi. Untuk menyikapi masalah pendidikan yang dihadapi, pendidikan luar sekolah menyelenggarakan berbagai program antara lain sebagai berikut (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (2) Program Keaksaraan Fungsional, (3) Program Pendidikan Dasar, (4) Program Pendidikan Kewanitaan, (5) Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (DIKLUSEMAS), dan (6) Program PLS lainnya seperti Program Pendidikan dan Pelatihan, Program Magang, serta Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*).

Program-program pendidikan luar sekolah merupakan program yang dapat dilaksanakan antar lintas sektor, karena itu program-program ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan lembaga mana saja sepanjang para *stakeholder* di maksud mempunyai niat yang tulus dan ikhlas untuk membantu upaya pendidikan secara merata, berkualitas dan berkesinambungan.

Gagasan tentang pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) bukanlah sesuatu yang baru, meskipun konsep pendidikan berorientasi kecakapan hidup baru digulirkan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Menurut Santoso S. Hamidjojo (2002 : 2-3) gagasan tentang pendidikan kecakapan hidup telah

dimulai oleh UNESCO pada tahun 1949 melalui konsep *functional literacy*. Gagasan pokok dari konsep tersebut adalah agar kemampuan baca-tulis-hitung dapat berfungsi memberi manfaat bagi yang bersangkutan untuk keluar dari tiga kesengsaraan, yaitu : kebodohan (*ignorance*), kepenyakitan (*ill-health*), dan kemelaratan (*poverty*).

Pentingnya pembelajaran kecakapan hidup telah mendapat pengakuan dari para pakar yang berkecimpung di dunia pendidikan. Penegasan tentang pentingnya kecakapan hidup dapat dilihat pada Pokok-Pokok Deklarasi Dakar Tahun 2000 tentang Pendidikan Untuk Semua (Fasli Jalal : 2004, 11-12) yang menunjukkan adanya hak bagi setiap warga negara, baik anak-anak maupun orang dewasa, untuk memperoleh kesempatan yang ada dalam mengikuti pendidikan kecakapan hidup, dan adanya kewajiban bagi setiap negara untuk menyediakan, memperbaiki, meningkatkan dan menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, terutama kecakapan hidup yang bersifat penting, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata.

Kecakapan hidup (*life skills*) merupakan sebuah konsep yang sering dikemukakan oleh para ahli maupun organisasi yang memiliki otoritas terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Konsep *life skills* dalam bidang kesehatan, seperti yang didefinisikan oleh WHO adalah sebagai suatu keterampilan atau kemampuan manusia untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seorang manusia mampu menghadapi berbagai

tuntutan dan tantangan dalam kehidupannya sehari-hari secara efektif, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan.

Pentingnya pendidikan kecakapan hidup bagi setiap pribadi karena mereka menghadapi berbagai masalah yang harus senantiasa diselesaikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kecakapan hidup itulah yang diperlukan pada individu memasuki kehidupan yang mandiri, anggota masyarakat dan warga negara. Sehingga dengan penguasaan terhadap *life skills*, individu diharapkan akan menjadi individu yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahannya dengan menemukan alternatif / solusi yang tepat yang berimplikasi positif bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang berada di sekitar kehidupannya. Perilaku dan karakter inilah yang akan menyebabkan mereka bisa beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan zaman, *survive* dan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi bangsanya.

Dalam pada itu, bahwa seseorang memerlukan berbagai macam kemampuan supaya dapat hidup dengan sukses, bahagia, bermartabat dalam masyarakatnya. Hal ini dapat terwujud jika seseorang/individu mampu mengembangkan komunikasi yang efektif dalam hidupnya, mampu mengembangkan kerjasama, mampu melaksanakan perannya (berdaya) sebagai warga negara yang bertanggung jawab, memiliki karakter dan berpola pikir maju dalam kehidupannya.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah dan tidak memiliki akses sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam berbagai dimensi kehidupannya.

Suharto (2005) melihat dimensi-dimensi tersebut adalah (a) memenuhi kebutuhan bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan.

Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap proses pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan ekonomi. Konsep ini yang mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, dalam Suharto, 2005). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses

pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu. Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti dikatakan oleh Donald Brown (dalam Suharto, 2005), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai “*incompatible or antithetical*”. Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap “*zero-sum game*” dan “*trade off*”. Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan melalui upaya pendidikan dipengaruhi oleh kondisi nilai budaya setempat. Nilai budaya lokal yang ditampilkan dalam bentuk tradisi, yang dianut oleh suatu masyarakat merupakan konsepsi yang telah lama berakar dalam diri individu yang direfleksikan melalui sikap. Nilai-nilai budaya yang dimiliki telah menanamkan garis pengarah dan mewarnai perilaku individu, maupun kelompok masyarakat.

Sumaatmadja (Suryana, 2009 : 68) mengemukakan bahwa dalam proses kehidupan individu yang selalu berhubungan dengan lingkungan sosial, ia tidak dapat lepas dari lingkungan budayanya. Norma, nilai, peraturan, pranata, bangunan, peralatan, sampai kepada pakaian yang melekat pada dirinya, merupakan lingkungan budaya yang mempengaruhi kepribadian individu yang bersangkutan.

Uraian ini menunjukkan bahwa dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan potensi nilai budaya lokal yang terdapat pada dilingkungan masyarakat. Potensi nilai budaya lokal berfungsi sebagai pedoman, aturan-aturan dan

norma-norma yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. P.J. Bouman (Kamil, 2007 : 54) memberikan alasan mengapa masyarakat tidak menyadari akan kehidupannya, hal tersebut terjadi sebagai akibat dari konsep pemahaman diri dan konsep pemahaman lingkungan yang selalu ditentukan oleh aturan-aturan yang sebenarnya tidak dipahami.

Padahal sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem-sistem tata kelakuan manusia lain yang tingkatannya lebih konkrit seperti aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma, semuanya juga berpedoman kepada sistem nilai budaya itu.

Dalam dimensi lain upaya memberdayakan masyarakat dipengaruhi pula oleh kondisi tingkat kehidupan dan faktor geografis terutama masyarakat di daerah pesisir. Kondisi ini mempengaruhi mata pencaharian penduduk nelayan setempat. Wilayah yang langsung bersentuhan dengan laut lepas pada umumnya pekerjaan nelayan adalah nelayan penangkap. Wilayah yang letaknya di daerah teluk, pekerjaan nelayan selain penangkap, ada juga yang melakukan budidaya hasil laut, seperti budi daya kepiting bakau, rumput laut, kerang, pertambakan, budi daya ikan seperti ikan karapu, pembuatan jaring perahu, pengolahan hasil laut dan sebagainya.

Mata pencaharian penduduk pada daerah kawasan pesisir dan kepulauan pada umumnya dibagi atas empat, yaitu *home industry*,

pedagang/distribusi, petani/nelayan dan buruh nelayan, (BP-PNFI Regional V, 2010 : 2).

(1) Home industry yaitu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hasil perikanan. Hal ini berupa mengolah hasil tangkapan ikan, atau kerajinan dari sumber laut. Kelompok ini sangat sedikit jumlahnya, kurang lebih 5 %, (2) Pedagang/distribusi, para pelaku ekonomi ini mendistribusikan hasil perikanan, baik berupa perikanan hasil tangkapan nelayan maupun home industri, dan kebanyakan masyarakat pesisir terutama yang pendatang lebih banyak bergerak disektor ini, kelompok ini jumlahnya kurang lebih 10 %, (3) Petani/nelayan, adalah nelayan pemilik modal pelaku ekonomi ini menyewakan peralatan nelayan baik berupa alat tangkap maupun kapal dengan sistem kerja bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan yang bergerak di sektor ini adalah para pendatang. Kelompok ini biasanya disebut punggawa atau juragan jumlahnya kurang lebih 25 %. Walaupun jumlahnya sedikit, cukup berpengaruh di daerah pesisir dan pulau karena sebagian besar penduduk sangat menggantungkan hidupnya pada kelompok ini, (4) Buruh/nelayan, adalah nelayan yang tidak mempunyai modal, dia hanya bermodalkan badan, dan yang bergerak di sektor ini adalah para nelayan tetap atau penduduk asli. Kelompok ini biasanya juga disebut sawi, hidupnya sangat tergantung punggawa. Kelompok ini merupakan kelompok besar di daerah pesisir, jumlahnya kurang lebih 60 %.

Kecamatan Batudaa Pantai merupakan salah satu Kecamatan yang berada diwilayah hukum Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang secara definitif terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 1995, sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Batudaa yang terdiri dari 13 (tiga belas) desa. Selanjutnya dimekarkan lagi pada tahun 2008 dengan hasil pemekarannya adalah Kecamatan Biluhu. Berdasarkan pemutahiran data penduduk akhir tahun 2009, jumlah penduduk Kecamatan Batudaa Pantai adalah 11.959 jiwa, terdiri dari laki-laki 6.142 jiwa dan 5.817 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga 2.984 KK, 712 KK diantaranya dikategorikan KK miskin (Laporan Akuntabilitas Kinerja, 2011: 2).

Selanjutnya dari studi eksplorasi yang dilaksanakan di daerah ini diperoleh data dan informasi bahwa sekitar 51% masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan (BPS Kabupaten Gorontalo, 2011). Sebagai mata pencaharian tetap para nelayan ini melakukan aktivitasnya dalam kondisi seadanya saja dan hal ini berpengaruh pula pada perolehan hasil tangkapan serta pendapatan mereka setiap hari dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pembangunan masyarakat, komunitas nelayan telah pula mendapatkan perhatian dari pemerintah kaitannya dengan program/kegiatan pembinaan kecakapan hidup peningkatan produktivitas usaha nelayan dan pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pendampingan dan bantuan dana. Bantuan pendampingan diwujudkan dalam bentuk penugasan tenaga fasilitator beserta dukungan dan operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu melaksanakan berbagai usaha mata pencaharian dengan tujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kualitas hidup masyarakat nelayan.

Berbagai kegiatan pendampingan dan fasilitasi yang telah dilakukan antara lain berupa, (1) pertemuan-pertemuan, musyawarah, diskusi, ditingkat komunitas/desa, untuk pengambilan keputusan atau sosialisasi, (2) pelatihan dan bimbingan, survey swadaya, kerja kelompok penyusunan program pembangunan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program, (3) Bantuan permodalan yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan fasilitas motorisasi nelayan, dan pemenuhan alat-alat tangkap, (4) Pengembangan koperasi nelayan

sebagai upaya strategis dalam membantu dan memfasilitasi segala kebutuhan nelayan dan keluarganya. Dari bentuk program pendampingan ini diharapkan dapat mewujudkan terciptanya masyarakat yang mampu melaksanakan usahanya secara lebih produktif, makin meningkatnya kondisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang pada gilirannya terbentuknya kemampuan masyarakat yang memiliki kemandirian berusaha.

Kemandirian berusaha masyarakat sangat erat kaitannya dengan sistem lingkungan sosial, sistem budaya, perubahan sosial ekonomi yang berpengaruh pula terhadap kehidupan interaksi mobilitas pergaulan masyarakat itu sendiri. Transformasi nilai-nilai budaya masyarakat yang beragam perlu dipertimbangkan dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan potensi, pemberdayaan masyarakat yang diharapkan oleh setiap individu, masyarakat dan negara.

Kajian tentang penyelenggaraan program kecakapan hidup bagi masyarakat penting dilakukan hal ini sebagaimana hasil temuan penelitian Wiratno (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2008 : 529-530) mengemukakan bahwa penyelenggaraan program *life skills* pada umumnya tidak didasari atas minat dan bakat serta kebutuhan peserta didik, melainkan program yang sudah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, sehingga pelaksanaannya belum dapat mencapai sasaran yang optimal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan kecakapan hidup harus merefleksikan nilai-nilai kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat preservatif dan progresif. Sekolah harus menyatu

dengan nilai-nilai kehidupan nyata yang ada di lingkungannya dan mendidik peserta didik sesuai dengan tuntutan nilai-nilai kehidupan yang sedang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka upaya pengembangan model pelatihan pendidikan kecakapan merupakan suatu program yang penting karena dapat memberikan peluang bagi masyarakat guna mengembangkan potensi yang dimilikinya, dalam penelitian ini diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya lokal. Selanjutnya urgensi pemberdayaan masyarakat sebagai sasaran dari upaya pendidikan luar sekolah diharapkan dapat memberi ruang pengembangan usaha produktif masyarakat sebagai alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya dan perwujudan kemandirian berusaha masyarakat pesisir dan atau masyarakat nelayan.

Jika suatu program pelatihan yang dilaksanakan dapat memberikan bekal dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat dapat mampu bekerja dan berusaha baik secara individu maupun kelompok, maka selain dapat menimbulkan semangat dan motivasi kerja bagi masyarakat itu sendiri pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan pendapatan serta kualitas hidup masyarakat. Berbagai model pelatihan telah banyak dikembangkan, baik yang bertujuan untuk kepentingan individu, lembaga, maupun masyarakat. Model-model yang dikembangkan melalui beberapa langkah seperti dikemukakan Sudjana (1993 :14), model latihan keterampilan kerja, model strategi latihan, model lima langkah, model tujuh langkah, model sembilan langkah. Dari formula model di atas, peneliti mengangkat upaya meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir melalui

pengembangan model konseptual pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dalam kaitan dengan tema penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa aspek masalah sebagai berikut:

1. Sebahagian besar masyarakat atau sekitar 51% bermata mata pencaharian nelayan (BPS Kabupaten Gorontalo, 2011). Dominannya mata pencaharian pokok masyarakat nelayan ini berkonsekuensi pula terhadap terbatasnya pengembangan jenis kecakapan dan keterampilan di lingkungan masyarakat pesisir yang pada akhirnya pula masyarakat hanya melakukan kegiatan dengan mata pencaharian sebagai nelayan, dan tingkat pendapatan yang minimal.
2. Penyelenggaraan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Batudaa Pantai pada umumnya belum sepenuhnya berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik khususnya bagi peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan.
3. Sebagai sebuah wilayah dengan komunitas mayoritas bermata pencaharian nelayan, Kecamatan Batudaa Pantai memiliki berbagai potensi lokal yang besar, baik berupa sumber daya alam, nilai-nilai budaya lokal, prinsip-prinsip kemasyarakatan, maupun

potensi lainnya yang dapat diberdayakan, akan tetapi berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan secara optimal.

4. Aspek pengembangan sumber daya manusia melalui upaya pendidikan nonformal, khususnya dalam kegiatan pendidikan kecakapan hidup masyarakat pesisir di Kecamatan Batudaa Pantai belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Oleh karenanya perlu dikembangkan sebuah model pelatihan kecakapan hidup sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir secara terprogram dan berkesinambungan.

### **C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Mengacu pada hasil identifikasi masalah maka permasalahan umum yang akan diteliti adalah **“bagaimana model pelatihan kecakapan hidup terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir”**

1. Bagaimana kondisi objektif sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.
2. Bagaimana kondisi objektif pendidikan kecakapan hidup di lingkungan masyarakat pesisir.
3. Bagaimana model konseptual pelatihan kecakapan hidup terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir.

4. Bagaimana implementasi model pelatihan kecakapan hidup terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir.
5. Bagaimana efektivitas model pelatihan kecakapan hidup terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir.

#### **D. Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Umum**

Menemukan model pelatihan kecakapan hidup terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir.

##### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui data kondisi objektif sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.
- b. Mengetahui kondisi objektif pendidikan kecakapan hidup di lingkungan masyarakat pesisir.
- c. Mengembangkan model konseptual pelatihan kecakapan hidup terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir.
- d. Mengetahui implementasi model pelatihan kecakapan hidup terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir.

- e. Mengetahui efektivitas model pelatihan kecakapan hidup terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir.

## **E. Manfaat Penelitian**

Model pelatihan pendidikan kecakapan hidup terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan kajian pendidikan luar sekolah, khususnya model pengembangan pendidikan luar sekolah yang berkaitan dengan konsep pembelajaran, pemberdayaan masyarakat dan kecakapan hidup. Dengan difokuskannya penelitian ini pada usaha untuk menemukan model, maka penelitian ini pun dapat dijadikan *prototype* model pengembangan pendidikan kecakapan hidup terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir. Pada akhirnya, hasil penelitian ini pun diharapkan dapat bermanfaat bagi perluasan kajian materi-materi Pendidikan Luar Sekolah yang berkenaan dengan dialektika keilmuan masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan masukan bagi pengembalian kebijakan dalam upaya pengembangan kehidupan masyarakat pesisir dalam rangka

meningkatkan kemandirian berusaha melalui model pelatihan kecakapan hidup yang dikembangkan.

- b. Dapat memberikan masukan positif bagi organisasi mitra sebagai wadah usaha peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks pengembangan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan dalam mempercepat perbaikan dan perwujudan kemandirian berusaha masyarakat nelayan dan keluarganya.
- c. Bermanfaat sebagai bahan kajian dan memberikan arah bagi pihak lain yang berminat untuk meneliti permasalahan ini secara lebih lanjut.

#### **F. Asumsi**

Kajian model pelatihan kecakapan hidup terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir, didasari beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai upaya termasuk dibidang pengembangan sumber daya pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang perlu disukseskan dan menjadi tanggung jawab semua pihak dalam mendukung implementasinya bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang diharapkan.
2. Upaya mengemban program pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan senantiasa didasari oleh tujuan pendidikan

nasional sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan baik tataran sektoral maupun program. Usaha untuk mencapai sasaran pendidikan nasional tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, pendidikan kecakapan hidup, pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya terbentuknya kemandirian berusaha dilingkungan masyarakat.

3. Suatu deskripsi ideal model pelatihan kecakapan hidup terintegrasi nilai-nilai budaya lokal dilingkungan masyarakat pesisir bagi peningkatan kemandirian masyarakat dapat dihasilkan melalui kajian dan sinergi keilmuan antara deskripsi sasaran masyarakat yang menjadi objek pembahasan dengan dukungan teori yang relevan dengan substansi kajian.
4. Bahwa dalam masyarakat senantiasa terdapat nilai-nilai budaya yang dipelihara dan menjadi bagian kehidupannya berfungsi sebagai kriteria dalam memilih tujuan-tujuan hidupnya. Nilai budaya merupakan unsur penting bagi kehidupan masyarakat termasuk masyarakat yang bermata pencaharian nelayan. Bagi masyarakat nelayan nilai-nilai ini biasanya dijunjung tinggi diakui bersama sebagai hasil konsensus yang erat kaitannya terhadap pandangan dan harapan dalam meningkatkan kemandirian berusaha guna memenuhi peningkatan kualitas hidup bermasyarakat.
5. Selanjutnya adanya kajian terhadap masyarakat yang diinginkan (kemandirian) dilapangan yang terkait dengan pentingnya

penyelenggaraan dan pengembangan kecakapan hidup dalam perspektif ilmiah, pada dasarnya sebagai tuntutan dalam menyelenggarakan program ini bagi upaya peningkatan kemandirian berusaha bagi masyarakat. Berdasarkan deskripsi ideal pendidikan kecakapan hidup terintegrasi nilai-nilai budaya lokal dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir yang merupakan hasil kajian dan sinergi keilmuan pada dasarnya dapat diajukan acuan penyusunan model konseptual (rancangan model) pendidikan kecakapan hidup dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat. Kajian ketiga unsur ini menjadi landasan bagi terciptanya suatu model yang efektif dan implementatif dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan kecakapan hidup terintegrasi nilai-nilai budaya lokal untuk meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir.

### **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan permasalahan penelitian, maka perlu dikemukakan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang berkaitan dengan variabel penelitian.

#### **1. Model Pelatihan**

Model merupakan interpretasi atas fenomena yang terjadi dalam praksis penyelenggaraan pelatihan, karena melalui model dapat dirumuskan serangkaian kegiatan yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk memperbaiki dan meningkatkan

kemampuan. Model pelatihan kecakapan hidup bagi masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kegiatan pelatihan bagi masyarakat sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta peningkatan partisipasi individu, kelompok dan masyarakat yang dilakukan dalam rangka memampukan dan memberdayakan diri sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal.

## 2. Pendidikan Kecakapan Hidup

Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.

Pendidikan kecakapan hidup yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan baik dan produktif.

Dalam arti bahwa pendidikan kecakapan hidup sebagai pendidikan yang memberi bekal dan latihan yang dilakukan secara benar kepada individu, kelompok tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjalankan kehidupannya, yaitu dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya secara optimal dan produktif.

### 3. Nilai-Nilai budaya Lokal

Secara umum, nilai sebagai ukuran sikap dan perasaan seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan keadaan baik buruk, benar salah atau suka tidak suka terhadap suatu obyek baik material maupun non material.

Nilai budaya lokal merupakan nilai yang berlaku bagi masyarakat yang biasanya dijunjung tinggi diakui bersama sebagai hasil konsensus erat kaitannya dengan pandangan dan harapan dalam meningkatkan kemandirian berusaha guna memenuhi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nilai budaya lokal yang diidentifikasi dan dikembangkan dalam penelitian ini dengan sasaran masyarakat nelayan terkait dengan kemandirian berusaha menyangkut aspek sebagai berikut : Toleran, Kepatuhan kepada Pemimpin/Pimpinan, Kerjasama, Kekkerabatan, Rasa Ingin Tahu, Menghargai Keberhasilan orang lain, Kerja Keras, dan Saling membagi hasil.

### 4. Kemandirian Berusaha

Secara umum konsep kemandirian dapat dikaji dalam dua hal, yaitu kemandirian “psikologis” dan “sikap mental kewirausahaan”. Kemandirian psikologis sebagai kesiapan dan kemampuan seseorang untuk melepaskan diri dari ikatan emosi dengan orang dewasa lain dalam mengatur, mengurus, dan menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri, seberapa jauh kemampuan mereka dalam mengambil keputusan dan melaksanakannya melalui

perbuatan atau tindakan nyata, serta kemampuan untuk melawan/menolak tekanan atau tuntutan orang lain berdasarkan prinsip benar dan salah, atau penting dan tidak penting. Sikap mental kewirausahaan berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kegiatan ekonomi yang dapat mencakup aspek percaya pada diri sendiri, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi kemasa depan.

Kemandirian berusaha dalam penelitian dipahami sebagai ketidaktergantungan kepada pihak lain (*dependency*). Ketidaktergantungan tidak berarti keterisolasian dan tidak berarti tidak mengenal adanya saling ketergantungan (*interdependency*). Kemandirian berusaha mengacu pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang didasari oleh kemandirian psikologis dan kemandirian berusaha.

#### 5. Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir adalah komunitas yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dengan mata pencaharian pokok bekerja sebagai nelayan. Dalam kelompok masyarakat pesisir di dalamnya terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat antara lain : (1) Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut, (2) Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan

pelelangan ikan, (3) Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir, (4) Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

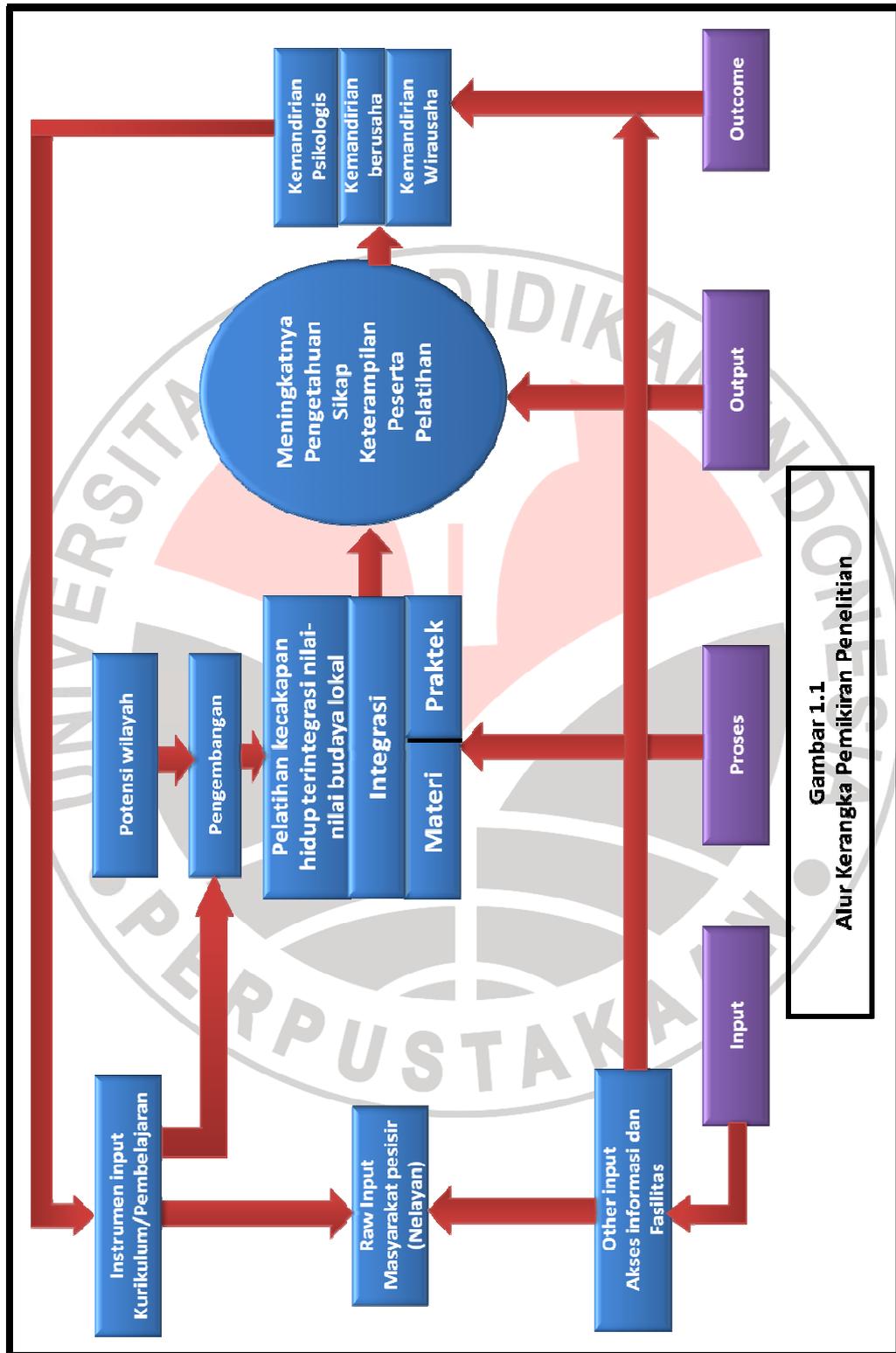
## H. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan pokok masalah dan tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka kajian dalam penelitian ini berupaya mengembangkan model kecakapan hidup terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir. Pengembangan model pelatihan kecakapan hidup merupakan masalah utama yang dijadikan variabel kunci dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. Kemandirian merupakan variabel yang dipengaruhi oleh kegiatan pelatihan kecakapan hidup yang diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya lokal yang diimplementasikan dilingkungan masyarakat pesisir.

Model konsep pelatihan kecakapan hidup dalam operasionalnya diidentifikasi melalui komponen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan aspek –aspek sebagai berikut: tujuan pembelajaran, kelompok sasaran, nara sumber, kurikulum, bahan belajar dan media pembelajaran, metode pelatihan, waktu serta evaluasi. Indikator-indikator tersebut merupakan komponen utama dalam mengembangkan model konsep pelatihan kecakapan hidup terintegrasi nilai-nilai budaya lokal dalam meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat pesisir. Kemandirian masyarakat diidentifikasi dari kemandirian psikologis dan sikap mental. Kedua dimensi indikator tersebut

selanjutnya diwujudkan dalam bentuk kemandirian bekerja, berusaha dalam hal meningkatnya pendapatan serta motivasi hidup, yang dipengaruhi oleh dimilikinya pengetahuan, keterampilan dan sikap positif aspiratif. Kaitan antar variabel yang dikembangkan dalam pengembangan model konsep penelitian terlihat pada bagan berikut.





Gambar 1.1 Alur Kerangka Pemikiran Penelitian